

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Penebar Swadaya Grup, Cetakan I, Jakarta, 2012
- A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undanag Undang Pokok Agraria, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Agus Sudarmadji dkk, Dinamika Hukum Agraria Indonesia (Dalam Rangka Memperingati 70 Tahun Guru Kami, Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S), (Jakarta: Prenadamedia Group, Jakarta: 2020
- Andhika Yuli Rimbawan, Omnibus Law Dan Dampaknya Pada Agraria Dan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.6 No.2, Desember 2020,
- Awan Abdoellah and Yudi Rusfiana, Teori & Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta Bandung, 2016
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Boedi Haarsono. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dan Hubungan Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001, Universitas Trisakti, 2002
- Boedi Harsono, Hukum Adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 1983
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta, Djambatan, 2002.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya., Jakarta: Djambatan, 2005

- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2004
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Boedi Harsono, Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya, Jakarta, Djambatan, 2005
- Burns J.H and H.L.A. Hart., A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. London: The Collected Works of Jeremy Bentham (The Athlone Press, 1977).
- Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Cetakan Ke-7, Radnya Paramita, Jakarta, 2000
- Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Darmodihardjo, Darji dalam Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta .2011.
- Diana R. W. Napitupulu, “Hukum Pertanahan”. UKI Press, Jakarta, 2023
- E. Fernando M. Manullang, “Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai”, Kompas, Jakarta, 2007
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum LangkahLangkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung. 2018.
- Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer,” Humaniora 3, no. 1, 2012
- G. Kertasapoetra, R. G Kartasapoetra, AG. Kartasapoetra, A. Setiady, Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina aksara, Jakarta, 1985
- H R Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

- I.G.N. Sugangga, *Hukum Adat Khusus Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat*, Semarang 1998
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola,, Surabaya, 2003.
- Jabalnur, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi dan Perlindungan Hukumnya)*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020
- Jeremy Bentham., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, 2000
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Lily Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Remadja Karya CV, Bandung, 1984
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2005
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perespetif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta., 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta (1), *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Gunung Agung, Jakarta, 1980
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT itra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rahmat Ramadhani, *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*, Umsu Press, Medan 2018
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Alumni, Jakarta, 1991

- Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta, Tugu Jogja Pustaka, 2005.
- Sayud Margono, Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang, Mandar maju., 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1996
- Suardi. Hukum Agraria, Badan Penertbit IBLM, Jakarta, 2005
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Suyud Margono, Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- T. Nazaruddin, Sengketa Penguasaan Tanah antara Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) versus Masyarakat. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 2007.
- Urip Santoso, "Hukum Agraria Kajian Komprehensif", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012
- Urip Santoso, Hukum Agraria, Kencana, Jakarta, 2013
- Valerine Jaqueline Leonore Kriekhoff, "Kedudukan Tanah Dati sebagai Tanah Adat di Maluku Tengah, Suatu Kajian dengan Memanfaatkan Pendekatan Antropologi Hukum" (Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penanganan Masalah Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 72 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten / Kotamadya

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999. Kehutanan.

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua).

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

C. JURNAL

Aartje Tehupeiory, Jurnal kajian Ilmiah, Permasalahan tanah ulayat dalam kegiatan investasi. Ubhara Jaya Volume 12 No. 4 2012.

Adhaper,” Tipologi Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya”, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No. 2 (Juli 2015)

- David Mikhael Silas. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat Terhadap Sengketa Tanah Antara Pertamina Dengan Warga Setempat.
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/v3/Index.Php/Administratum/Issue/View/3619>.
- Dolfries J Neununy. "Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir". Balobe law journal, Vol. 1 No. 2, Oktober 2021.
- Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," Jurnal Konstitusi 19, 2022
- Hendra Sukarman, DEGRADASI KEADILAN AGRARIA DALAM OMNIBUS-LAW, 2021
- Ismail, F. (2023). The Dynamics of Conflict Resolution and the Potential for Disintegration in West Papua in the Context of the Unity of the Republic of Indonesia: An Analysis of Conflict and Disintegration in the Papua Region. *Pasundan Social Science Development*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.56457/pascidev.v4i1.74>
- Lubis, A. F. (2022). Penanganan Konflik Masyarakat Adat Papua Barat Melalui Pendekatan Antropologi Oleh Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*,
- Natalia Runtuwene, "Pemberian Ganti Rugi terhadap Penguasaan Tanah tanpa Hak", *Jurnal Lex Privantum*, Vol. 2, No. 3 (Agustus 2014)
- Padmi, M. F. M. (2019). Poverty, Deprivation, and Social Exclusion as Source of Violent Conflict: Case Study of West Papua Post-New Order Era. *GLOBAL INSIGHT JOURNAL*, 4(1). <https://doi.org/10.52447/gij.v4i1.1659>
- Philpott, S. (2018). This stillness, this lack of incident: making conflict visible in West Papua. *Critical Asian Studies*, 50(2), 259–277. <https://doi.org/10.1080/14672715.2018.1445537>

D. MEDIA/INTERNET

Chauvel, R. (2021). West Papua: Indonesia's last regional conflict. *Small Wars & Insurgencies*, 32(6), 913–944. <https://doi.org/10.1080/09592318.2021.1990491>

Detik.com, “Bentrok Tewaskan 6 Orang di Flores Timur Dipicu Sengketa Lahan Adat,” <https://news.detik.com/berita/d-4927357/bentrok-tewaskan-6-orang-di-flores-timur-dipicu-sengketa-lahan-adat>, 5/3/2020, diakses 10/9/2022; BBC News Indonesia, “Poroduka Meregang Myawa di Tengah Konflik Agraria Sumba Barat,” <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-44022495>, 16/5/2018, diakses 10/9/2022.

I Ketut Oka Setiawan, “Dinamika Perubahan Hak Penguasaan atas Tanah Adat dan Akibatnya terhadap Peranan Desa: Studi Kasus di Desa Tenganan Pegringsingan” (Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002); Nurul Elmiyah, “Negara dan Masyarakat Adat: Studi mengenai Hak atas Tanah dan Hasil Hutan di Mamahak Besar dan Long Bangun, Kalimantan Timur” (Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003); dan Kurnia Toha, “The Struggle Over Land Rights: A Study of Indigenous Property Rights” (Disertasi, University of Washington, Seattle, 2007).

Kantor BAPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan LITBANG (Penelitian dan Pengembangan) Kabupaten Fakfak

Lihat artikel pemberitaan media massa di tahun 2020, 2021, dan 2022, di antaranya: BBC News Indonesia, “Masyarakat Adat Besipae di NTT yang ‘Digusur’ dari Hutan Adat Pubabu: Anak-anak dan Perempuan ‘Trauma’ dan ‘Hidup di Bawah Pohon’,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101>, 20/8/2020, diakses 20/8/2021; BBC News Indonesia, “Ancaman Pidana Masyarakat Dayak Modang Long Wai Kalimantan yang Tutup Jalan Desa dari Perusahaan Sawit,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56293417>, 8/3/2021, diakses 5/6/2022;

Detik.com, “Bentrok Soal Lahan di Puncak Siosar Karo, 17 Orang Jadi Tersangka,” <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6092185/bentrok-soal-lahan-di-puncak-siosar-karo-17-orang-jadi-tersangka>, 23/5/2022, diakses 8/11/2022

Menurut David Bouchier, keberanian masyarakat hukum adat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat meningkat pesat sejak kejatuhan Presiden Soeharto di pertengahan 1998. Hal ini ditandai dengan munculnya gerakan nasional untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat melalui pembentukan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dan inisiatif desentralisasi pemerintahan Habibie yang mulai mengakui hak tradisional melalui peraturan nasional dan peraturan daerah. Lihat David Bouchier, “The Romance of Adat in the Indonesian Political Imagination and the Current Revival,” dalam *The Revival of Tradition in Indonesian Politics; The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*, ed. Jamie S. Davidson, dan David Henley (London: Routledge, 2007),

Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Laporan Akhir Penelitian Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Tahun 2020 (Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2020).

Verlia Kristiani, Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi, *Jurnal Hukum Vol.11 No.1*, hlm 150, diakses pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 22.59 WIB, <https://academicjournal.yarsi.ac.id>